REVIU 3

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jendral Sudirman No. 73 Komplek Perkantoran Marabahan - 70513
Telepon/Fax 0511-4799222

Reviu Ke-3

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya ***Rencana Strategis (RENSTRA)*** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini dapat diperbaiki untuk reviu yang ketiga.

Dokumen Rencana Strategis hasil reviu ketiga ini memberikan gambaran tentang program-program dan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan perbaikan Rencana Strategis ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan perbaikan Dokumen Renstra ini. Akhirnya, semoga Dokumen Renstra Bappelitbang Tahun 2017-2022 hasil reviu ketiga ini memberikan manfaat, sebagai arahan/pedoman melaksanakan tugas bagi aparatur Bappelitbang dan dasar untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Marabahan, Agustus 2020

Kepala Badan

Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc

NIP. 19660705 199203 1 016

Reviu Ke-3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sitematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANG	6
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbang	6
	2.1.1. Tugas	6
	2.1.2 Fungsi	6
	2.1.3 Struktur Organisasi	7
	2.2. Sumber Daya Bappelitbang	10
	2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
	2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	11
	2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	12
	2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi	13
	2.2.5. Fasilitas Perlengkapan	13
	2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbang	13
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang	17
	2.4.1. Tantangan	17
	2.4.2. Peluang	19

BAB III	PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS BAPPELITBANG	20
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbang	20
	3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis	20
	3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal	26
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27
	3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga	28
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
	3.5. Penentuan isu-isu Strategis	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	31
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	41
BAB VII	KINERJA BAPPELIBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	48
BAB VIII	PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel	2.2.	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	11
Tabel	2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Tabel	2.4.	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	13
Tabel	2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Barito Kuala	15
Tabel	2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbang Barito Kuala	16
Tabel	3.1.	Matriks Kekuatan Bappelitbang	21
Tabel	3.2.	Matriks Kelemahan Bappelitbang	22
Tabel	3.3.	Matriks Peluang Bappelitbang	24
Tabel	3.4.	Matriks Ancaman Bappelitbang	25
Tabel	3.5.	Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis Bappelitbang	26
Tabel	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (awal)	32
Tabel	4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (reviu kedua)	33
Tabel	4.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (reviu ketiga)	34
Tabel	5.1.	Analisa Lingkungan Strategis Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	36
Tabel	5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
Tabel	6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator	42
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Bappelitbang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Awal)	44
Tabel	7.2.	Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (reviu kedua)	50
Tabel	7.3.	Tujuan dan Sasaran Indikator Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Reviu Kedua)	51
Tabel	7.4.	Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (reviu ketiga)	52
Tabel	7.5.	Tujuan dan Sasaran Indikator Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Reviu Ketiga)	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1.	Bagan SOTK Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Awal	8
Gambar	2.2.	Bagan SOTK Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Reviu Ketiga	10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyeleggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodiK (LKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam

meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas. Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam ukuran waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
9. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua karyawan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan lima tahunan dan rencana kerja tahunan;

4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang):

1. Memenuhi kebutuhan perubahan dalam lingkungan pemerintah yang semakin kompleks dan dinamis;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan pada masa depan;
5. Memudahkan/meningkatkan komunikasi para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan pelayanan secara optimal dan berkualitas;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Bappelitbang

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Bappelitbang
  - 2.1.1. Tugas
  - 2.1.2. Fungsi
  - 2.1.3. Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Bappelitbang
2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
2.2.2. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi
2.2.5. Fasilitas Perlengkapan
2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbang
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang
2.4.1. Tantangan
2.4.2. Peluang

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappelitbang

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbang
3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis
3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANANN BAPPELITBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbang

Bappelitbang sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas untuk melayani, proses perencanaan, mengawal, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD mengacu pada peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang meliputi tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bidang penataan ruang dan statistik melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan perencanaan pada bidang Sosial Budaya, bidang Ekonomi, Fisik Prasarana, Bidang Penelitian dan Pengembangan pembangunan yang Menyajikan laporan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai Perumusan Kebijakan Teknis dan pembinaan pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah untuk tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di seluruh bidang urusan wajib dan pilihan pemerintah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan evaluasi di bidang Sosial Budaya yang meliputi Pemerintahan, sumber daya manuasi, dan Sosial & budaya.

2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi fisik prasarana yang meliputi Ekonomi dan Fisik Prasarana.
3. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Penelitian dan Pengembangan, Pengendalian Sosial & Budaya dan Pengendalian Ekonomi, Fisik Prasarana.
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, program pembangunan dan keuangan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Bappelitbang dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Unsur Pelaksana terdiri dari:
   a. Bidang Sosial Budaya yang terdiri dari Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, Sub Bidang SDM dan Budaya dan Sub Bidang Pengendalian Sosial Budaya.
   b. Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana yang terdiri dari Kepala Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana dibantu oleh Sub Bidang Ekonomi, Sub Bidang Fisik Prasarana dan Sub Bidang Pengendalian Ekonomi dan Fisik Prasarana.
   c. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Sub Bidang Diseminasi Penelitian dan Pengembangan dan

Sub Bidang Pengkajian dan Analisis Permasalahan Pembangunan

4. Kelompok Jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisi meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

Gambar 2.1.
Bagan SOTK Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala (awal)

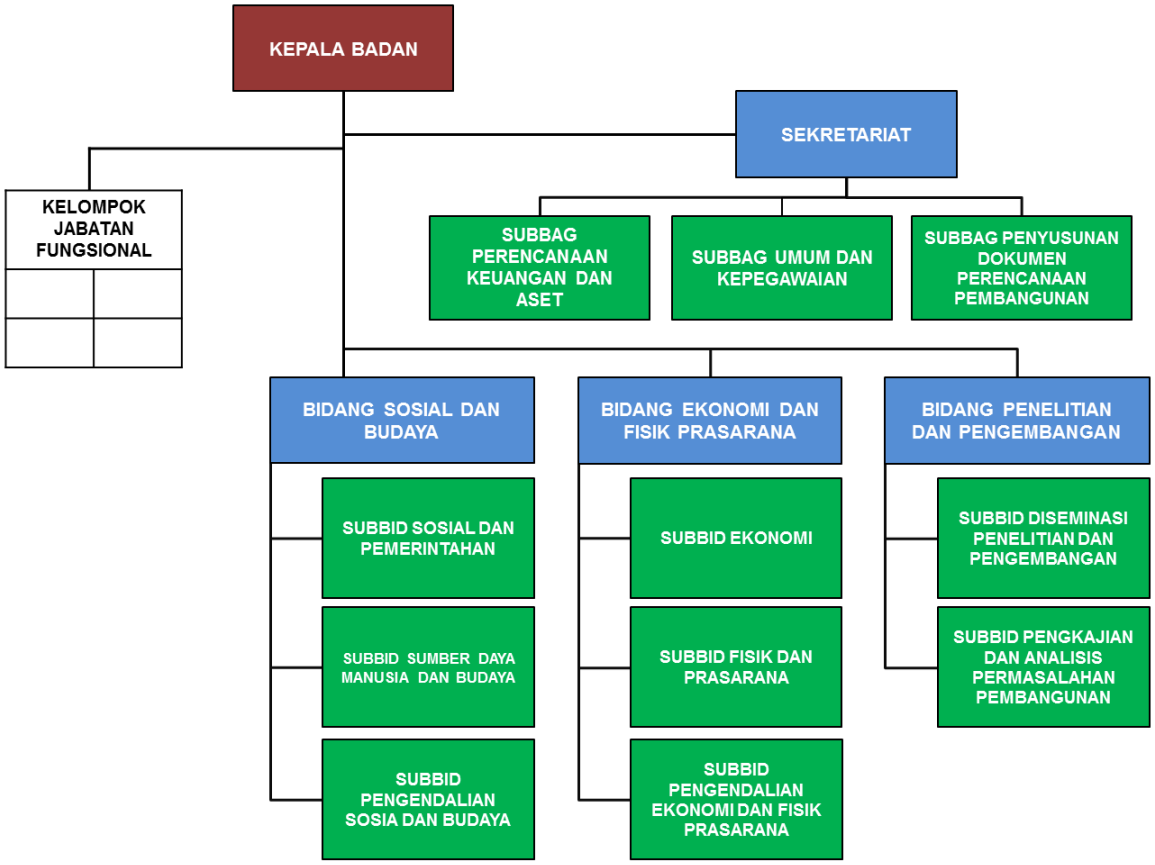

Setelah reviu ketiga struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Bappelitbang dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dan

Sub Bagian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Unsur Pelaksana terdiri dari:
   a. Bidang Sosial Budaya yang terdiri dari Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh Sub Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Sosial Budaya.
   b. Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana yang terdiri dari Kepala Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana dibantu oleh Sub Bidang Ekonomi dan Sub Bidang Fisik Prasarana.
   c. Bidang Pengendalian dan Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian dan Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Pengendalian Sosial Budaya, dan Sub Bidang Pengendalian Ekonomi, Fisik Prasarana.
4. Kelompok Jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisi meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

Gambar 2.2.
Bagan SOTK Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala (Reviu Ketiga)
Perbup Nomor 47 Tahun 2019

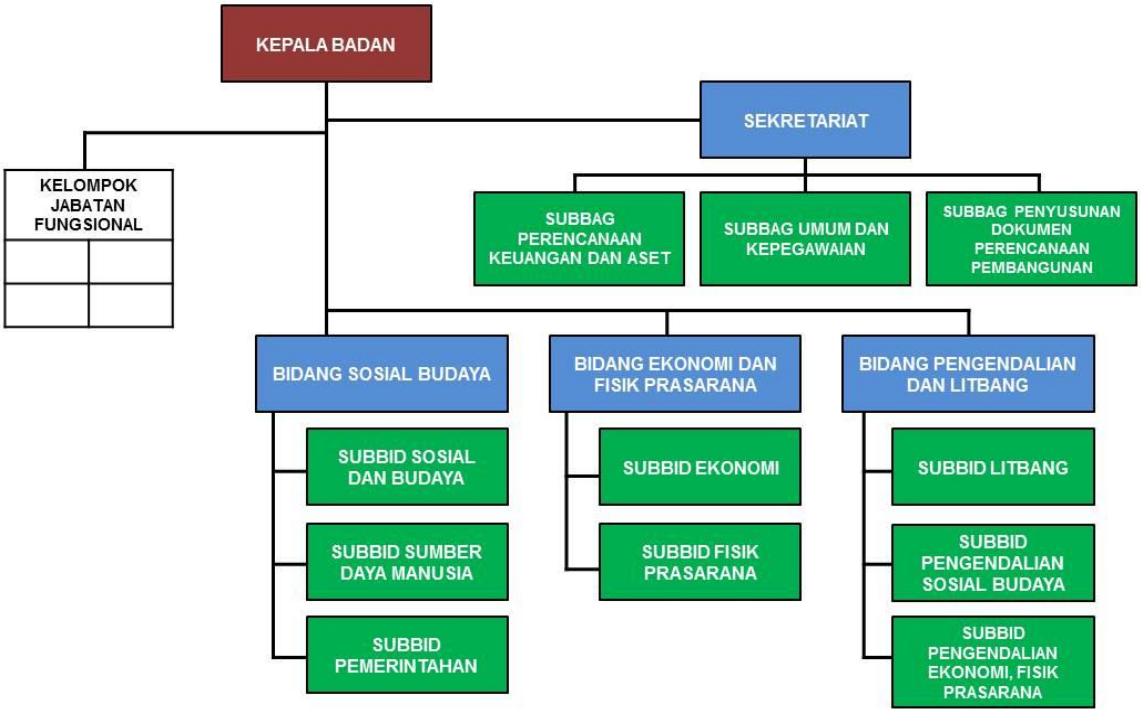

2.2. Sumber Daya Bappelitbang

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 15 orang pria dan 9 orang wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)		Persentase
1	Strata 3	1	Orang Pria	4,17%
		-	Orang Wanita	0,00%
2	Strata 2	6	Orang Pria	25,00%
		3	Orang Wanita	12,50%
3	Strata 1	6	Orang Pria	25,00%
		5	Orang Wanita	20,83%
4	Strata D III	-	Orang Pria	0,00%
		1	Orang Wanita	4,17%
5	SLTA	2	Orang Pria	8,33%
		-	Orang Wanita	0,00%
Jumlah		15	Orang Pria	62,50%
		9	Orang Wanita	37,50%

2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan pegawai di Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Jenis Diklat Penjenjangan	Jumlah (orang)		Persentase
1	Diklat Pim II	1	Orang Pria	7,69%
		-	Orang Wanita	0,00%
2	Diklat Pim III	3	Orang Pria	23,08%
		-	Orang Wanita	0,00%
3	Diklat Pim IV	5	Orang Pria	38,46%
		4	Orang Wanita	30,77%
Jumlah		9	Orang Pria	69,23%
		4	Orang Wanita	30,77%

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan IV (empat) berjumlah 6 orang (25,00%), Golongan III (tiga) berjumlah 15 orang (62,50%), dan yang paling sedikit adalah Golongan II (dua) yang berjumlah 3 orang (12,50%). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Pembina Utama Muda (IV/C)	1 Orang Pria	4,17%
		- Orang Wanita	0,00%
2	Pembina TK.I (IV/B)	1 Orang Pria	4,17%
		- Orang Wanita	0,00%
3	Pembina (IV/A)	3 Orang Pria	12,50%
		1 Orang Wanita	4,17%
4	Penata TK.I (III/D)	4 Orang Pria	16,67%
		4 Orang Wanita	16,67%
5	Penata (III/C)	2 Orang Pria	8,33%
		1 Orang Wanita	4,17%
6	Penata Muda TK.I (III/B)	- Orang Pria	0,00%
		- Orang Wanita	0,00%
7	Penata Muda (III/A)	2 Orang Pria	8,33%
		2 Orang Wanita	8,33%
8	Pengatur TK.I (II/D)	1 Orang Pria	4,17%
		1 Orang Wanita	4,17%
9	Pengatur (II/C)	1 Orang Pria	4,17%
		- Orang Wanita	0,00%
10	Pengatur Muda TK.I (II/B)	- Orang Pria	0,00%
		- Orang Wanita	0,00%
Jumlah		15 Orang Pria	62,50%
		9 Orang Wanita	37,50%

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

Menduduki jabatan Struktural dan fungsional (nonangka kredit) di Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan Esselon	Jumlah (orang)	Persentase
1	Esselon II.a	1 Orang Pria	4,17%
		- Orang Wanita	0,00%
2	Esselon III.a	1 Orang Pria	4,17%
		- Orang Wanita	0,00%
3	Esselon III.b	3 Orang Pria	12,50%
		- Orang Wanita	0,00%
4	Esselon IV.a	5 Orang Pria	0,00%
		4 Orang Wanita	16,67%
5	Non Struktural / Fungsional Non Angka Kredit	5 Orang Pria	20,83%
		5 Orang Wanita	0,00%
Jumlah		15 Orang Pria	62,50%
		9 Orang Wanita	37,50%

2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Bappelitbang berupa:

1. Peralatan kantor dan mesin memadai,
2. Gedung dan bangunan semi permanen,
3. Jaringan listrik dan air, telepon yang memadai,
4. Aset tetap lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka selama kurun waktu Tahun 2017-2022 Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala telah dapat menyelesaikan dokumen-

dokumen rencana pembangunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan Perundangan-Undangan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala yang disusun setiap tahun.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031.

Tabel 2.5.
Pencapaian kinerja pelayanan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi Bappelitbang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbang
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama 1 Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan menjamin terlaksananya perencanaan pembangunan daerah.	1.461.935,80	2.121.769,15	1.943.780,92	1.787.030,14	2.002.875,80	1.241.371.93	1.806.170,28	1.769.665,15	1.606.794,55	1.709.102,29	84,91	85,12	91,04	89,91	85,33	108.000,00	5,40 %
Kinerja Utama 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.	-	-	-	-	252.872,95	-	-	-	-	228.927,88	-	-	-	-	90,53		
	1.461.935,80	2.121.769,15	1.943.780,92	1.787.030,14	2.255.748,75	1.241.371.93	1.806.170,28	1.769.665,15	1.606.794,55	1.938.030,17	84,91	85,12	91,04	89,91	85,92	108.000,00	5,40 %

Dari Tabel 2.5. Pencapaian kinerja pelayanan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala melalui indikator "Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah", selama periode Renstra Tahun 2012-2017 telah tercapai secara maksimal. Keberhasilan Bappelitbang mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan menyelaraskan Dokumen RKPD dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala, dan menyelaraskan Dokumen Renja dengan Renstra SKPD.

Dari Tabel 2.6. seiring dengan telah ditetapkannya SOTK yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, terbentuklah Bidang Litbang (Bidang Penelitian dan Pengembangan) untuk mengampu kinerja Utama "Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder". Dengan konsekuensi adanya pendanaan di Tahun Anggaran 2017 untuk menambah jumlah dokumen penelitian dan meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang

Keberhasilan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala yaitu:

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappelitbang baik oleh internal Bappelitbang maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya
4. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Bappelitbang secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;
5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappelitbang;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappelitbang dengan SKPD lain;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up;*
10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;

11. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan keuangan daerah akan meningkat pula untuk pendanaan pembangunan daerah;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Terbukanya peluang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagai institusi perencana dituntut untuk dapat menjabarkan arah strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Perencanaan awal yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Barito Kuala kedepan. Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Bappelitbang memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan.

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis

Rencana Strategis Bappelitbang Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbang Tahun 2017-2022 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

3.1.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana; serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappelitbang dalam lima tahun mendatang (2017-2022).

Analisa lingkungan internal di Bappelitbang meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi:

1. **Kekuatan (Potensi)** yang dimiliki di Bappelitbang , yaitu:
   a. Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;
   b. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
   c. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
   d. Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.

Tabel 3.1
Matriks Kekuatan Bappelitbang

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;	25	4	1,00
2	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;	15	3	0,45
3	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;	25	4	1,00
4	Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.	35	4	1,45
	TOTAL	100		3,90

Catatan :

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

2. **Kelemahan (kendala)** yang ada di Bappelitbang, yaitu:
   a. Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
   b. Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan;
   c. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan;
   d. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan;
   e. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.

Tabel 3.2.
Matriks Kelemahan Bappelitbang

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;	20	3	0,60
2	Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan;	25	4	1,00
3	Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu	20	4	0,80

	pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan;			
4	Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan;	20	4	0,80
5	Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik	15	4	0,60
	TOTAL	100		3,80

Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

3.1.1.2. Indentifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bappelitbang dalam lima tahun mendatang (2017-2022). Dari hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Bappelitbang dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

1. **Peluang,** yang tersedia bagi Bappelitbang, yaitu:
   a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah;
   b. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati terhadap Bappelitbang;

c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappelitbang;
d. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan;
e. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

Tabel 3.3.
Matriks Peluang Bappelitbang

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah;	15	3	0,45
2	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati terhadap Bappelitbang;	25	4	1,00
3	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappelitbang;	30	4	1,20
4	Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan;	20	4	0,80
5	Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	10	3	0,30
	TOTAL	100		3,75

Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

2. **Ancaman atau Tantangan,** yang dihadap Bappelitbang antara lain, yaitu:
   a. Lemahnya koordinasi antar SKPD;
   b. Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipastif, transparan dan akuntabel;
   c. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;
   d. Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.4.
Matriks Ancaman Bappelitbang

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Lemahnya koordinasi antar SKPD;	30	4	1,20
2	Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipastif, transparan dan akuntabel;	20	4	0,80
3	Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;	25	4	0,80
4	Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program	25	4	0,80

	dan kegiatan.			
	TOTAL	100		3,60

Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil identiifkasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan Bappelitbang, serta identifikasi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, maka keseimbangan lingkungan strategis Bappelitbang menunjukkan bahwa Bappelitbang masih memiliki keseimbangan yang positif, yaitu 0,10 untuk lingkungan internal dan 0,15 untuk lingkungan eksternal. Kondisi ini menyiratkan bahwa Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala masih harus terus meningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.5.
Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis Bappelitbang

Indikator	Skor Tetrimbang	Indikator	Skor Tertimbang
1. Kekuatan	3,90	1. Peluang	3,75
2. Kelemahan	3,80	2. Ancaman	3,60
KESEIMBANGAN	0,10	KESEIMBANGAN	0,15

Berdasarkan matriks keseimbangan lingkungan strategis Bappelitbang tersebut, dalam tahun 2017-2022 strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan ditempuh oleh Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala diprioritaskan untuk menjaga dan memantapkan kinerja kinerja yang telah dicapai selama ini.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017–2022 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017 – 2022:

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut : **"Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera"**, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian;
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia;
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka Bappelitbang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Visi dan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Untuk itu Visi Bappelitbang adalah "Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera" dan Misi Bappelitbang adalah "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani".

Sesuai kebijakan Pemerintah Nasional dan penjelasan lisan dari pejabat di Kemenpan, Visi dan Misi SKPD tetap ada tapi boleh sama dengan Visi dan Misi Kabupaten atau tetap selaras. Untuk Bappelitbang Visinya sama dengan Visi Kabupaten sedangkan Misinya sesuai dengan Misi keempat dengan target untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah "**Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel".** Sejalan dengan itu, pengertian kata **berkualitas, sinergis** dan **kredibel.** Terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Berkualitas**
   a. Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kelembagaan/Lembaga dan Daerah dalam menyusun perencanaannya masing-masing; dan
   b. Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good governance and clean government.
2. **Sinergis**

   Perencanaan dan penganggaran yang dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah.
3. **Kredibel**

   yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi dan data yang terkini (evidence based dan knowledge based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial;
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal : Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan;
3. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum;

4. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestic dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan;
5. Pelayanan transportasi publik masih rendah;
6. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di alur sungai barito, khususnya transportasi angkutan batu bara berpotensi menurunkan kualitas cagar alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang (limbah batu bara, bbm kapal, penggerusan, pengaruh negative terhadap flora dan fauna yang di lindungi);
7. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relative rendah terutama pada persampahan, jaringan litrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi;
8. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan kabupaten barito kuala; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional. Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relative tinggi, dan potensi Kepariwisataan belum berkembang secara optimal;
9. Penyebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggal, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Bappelitbang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penataan Tata Ruang yang harus terkendali sebagaimana amanat Perda Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 tahun 2012;
2. Sumber Daya Manusia yang masih relative terbatas, masih perlu peningkatan secara kualitas dan kuantitas;
3. Kualitas dokumen perencanaan di SKPD yang perlu ditingkatkan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi Bappelitbang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Visi Bappelitbang adalah **"Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera"** dan Misi Bappelitbang adalah **"Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani"**.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Sebelum direviu (awal)
    a. Tujuan Bappelitbang adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator *Persentase Dokumen Perencanaan SKPD Yang Selaras dengan RPJMD.*
    b. Sasaran Bappelitbang ditetapkan sebanyak 2 sasaran adalah sebagai berikut:
        1) Terwujudnya Perencanaan Daerah Yang Berkualitas, dengan 2 (dua) indikator yaitu "Persentase Perencanaan Pembangunan yang Direalisasikan" dan "Persentase Diseminasi Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Perencanaan"
        2) Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Tata Ruang, dengan 1 (satu) indikator yaitu "*Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW".*
2. Reviu Kedua:
    a. Tujuan Bappelitbang adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator "*Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan".*
    b. Sasaran Bappelitbang ditetapkan sebanyak 2 sasaran adalah sebagai berikut:

1) Maningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Indikator "*Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja".*
2) Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang dengan Indikator "*Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW*".

3. Reviu Ketiga
   a. Tujuan Bappelitbang adalah Meningkatkan "*Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani*", dengan Indikator "*Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan* ".
   b. Sasaran Bappelitbang adalah "*Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*", dengan Indikator "*Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan*".

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1,4.2 dan 4.3 berikut.

Reviu Ke-3

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (Awal)

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase Dokumen Perencanaan SKPD Yang Selaras dengan RPJMD.	*Σ Program/ kegiatan di Renstra/Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD* ***dibagi*** *Σ Program/ kegiatan di RPJMD Kab. Barito Kuala* ***dikali*** *100%*	1. Terwujudnya Perencanaan Daerah Yang Berkualitas.	1. Persentase Perencanaan Pembangunan Yang Direalisasikan.	*Σ Program SKPD di RKPD* ***dibagi*** *Σ Program SKPD di RPJMD* ***dikali*** *100%*	100	100	100	100	100
					2. Persentase Diseminasi Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan.	*Σ Dokumen Hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan* ***dibagi*** *Σ Dokumen Penelitian yang dihasilkan* ***dikali*** *100%*	100	100	100	100	100
				2. Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Tata Ruang.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.	*Σ Rekomendasi yang sesuai dengan RTRW* ***dibagi*** *Σ Jumlah permohonan Pemanfaatan Ruang* ***dikali*** *100%*	100	100	100	100	100

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (Reviu Kedua)

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	*Σ Program/ kegiatan di Renstra/Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD* ***dibagi*** *Σ Program/ kegiatan di RPJMD Kab. Barito Kuala* ***dikali*** *100%*	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja	*Σ Nilai Sakip SKPD* ***dibagi*** *Σ Jumlah SKPD* ***dikali*** *100%*	22,50	23,30	23,50	23,75	24,00
				Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Tata Ruang.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.	*Σ Rekomendasi yang sesuai dengan RTRW* ***dibagi*** *Σ Jumlah permohonan Pemanfaatan Ruang* ***dikali*** *100%*	100	100	100	100	100

Tabel 4.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (Reviu Ketiga)

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	*Σ Program/ kegiatan di Renstra/Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD* ***dibagi*** *Σ Program/ kegiatan di RPJMD Kab. Barito Kuala* ***dikali*** *100%*	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan	*Nilai SAKIP Kabupaten x 30%*	20,77 dari nilai 69,23	22,07 dari nilai 73,55	22,96 dari nilai 76,55	23,12 dari nilai 77,05	23,48 dari nilai 78,28

BAB V
SASARAN DANA DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappelitbang, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

Analisa lingkungan internal dan eksternal tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang (2017-2022) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dilakukan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan kinerja Bappelitbang.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappelitbang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakandan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.
Analisa Lingkungan Strategis Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala

Eksternal / Internal	**Peluang:**	**Ancaman:**
	1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah; 2) Adanya dukungan yang kuat dari Bupati / Wakil Bupati terhadap Bappelitbang ; 3) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam perencanaan berbasis kinerja; 4) Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan; 5) Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	1) Lemahnya koordinasi antar SKPD; 2) Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipastif, transparan dan akuntabel; 3) Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran; 4) Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
Kekuatan: 1) Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai; 2) Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai; 3) Tingginya motivasi sumberdaya manusia dalam meningkatkan kinerja; 4) Berkembangnya pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan;	**Keterkaitan S – O** 1) Pengembangan SDM dan yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah; 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi informasi memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 3) Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis	**Keterkaitan S – T** 1) Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal; 2) Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; 3) Peningkatan pengetahuan dan

	menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan semakin efektif dan efisien.	pengalaman dan peningkatan sinergi antar SKPD menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan bermutu.
Kelemahan: 1) Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 2) Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan; 3) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan; 4) Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan; 5) Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik	**Keterkaitan W – O** 1) Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang andal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan berbasis desa dan kecamatan; 3) Pengembangan data dasar dan informasi wilayah desa dan kecamatan yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan; 4) Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah.	**Keterkaitan W – T** 1) Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan perencananaan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel; 2) Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah; 3) Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. 4) Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2016

1. Keterkaitan Potensi - Peluang (S-O)

a. Pengembangan SDM yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi informasi menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
c. Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan semakin efektif dan efisien.

2. Keterkaitan Potensi – Ancaman (S – T)

a. Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal;
b. Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
c. Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antar SKPD menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan bermutu.

3. Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – O)

a. Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang andal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan;
b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan berbasis desa dan kecamatan;
c. Pengembangan data dasar dan informasi wilayah desa dan kecamatan yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan;

d. Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

4. Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – T)

a. Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan perencananaan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel;

b. Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah;

c. Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.

Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappelitbang Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera**			
MISI 4 : **Menetapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani**			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang terbuka dan melayani	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Menyusun Perencanaan terintergrasi.	Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi.
		Mengidentifikasi Permasalahan pada Dokumen Perencanaan.	Melaksanakan Kajian Permasalahan pada Dokumen Perencanaan SKPD.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Bappelitbang setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Bappelitbang dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbang.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Bappelitbang menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG) KABUPATEN BARITO KUALA (REVIU KE-3)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Memantapakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani	Meningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala	Kab. Batola
							Rp1.865.578.300	Rp2.968.407.900	Rp2.076.337.000	Rp2.010.988.000	Rp2.680.988.000	Rp 11.602.299.200		
			4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah RENSTRA SKPD Yang Selaras Dengan RPJMD.	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	Sekretaris	Kab. Batola
							Rp 863.330.300	Rp 804.227.200	Rp 380.000.000	Rp 380.000.000	Rp1.030.000.000	Rp 3.457.557.500		
			4.03.01.21.05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD Kab. Barito Kuala 2017-2022 (Dokumen)	1	-	-	-	1	-	1	Subbag. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Batola
						Rp 350.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 350.000.000	Rp 350.000.000		
			4.03.01.21.07	Penetapan RPJMD	Jumlah Perda RPJMD Kab. Barito Kuala 2017-2022 yang ditetapkan (Perda)	2	1	-	-	-	1	2	Subbag. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Batola
						Rp 613.120.500	Rp 313.120.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 300.000.000	Rp 613.120.500		
			4.03.01.21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan (Dokumen)	2	2	2	2	2	2	2	Subbag. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Batola
						Rp 381.640.000	Rp 162.395.000	Rp 219.245.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 381.640.000		
			4.03.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Kali)	9	9	9	9	9	9	9	Subbag. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Batola
						Rp 606.937.300	Rp 196.037.300	Rp 410.900.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 606.937.300		

			4.03.01.21.10	Penetapan RKPD	Jumlah Perda RKPD Kab. Barito Kuala yang ditetapkan (Dokumen)	6	6	6	6	6	6	6	Subbag. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Batola
						Rp 1.436.052.200	Rp 121.970.000	Rp 174.082.200	Rp 380.000.000	Rp 380.000.000	Rp 380.000.000	Rp 1.436.052.200		
			4.03.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Jumlah Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Pelaksanaan Pembangunan dari Sumber Anggaran Daerah dan Pusat (Laporan)	1	1	1	0	0	0	1	Subbag. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Batola
						Rp 69.807.500	Rp 69.807.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 69.807.500		
			4.03.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah RENSTRA SKPD Urusan Bidang Sosial Budaya Yang Selaras Dengan RPJMD.	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	Bidang Sosial Budaya	Kab. Batola
					Jumlah RENJA SKPD Urusan Bidang Sosial Budaya Yang Selaras Dengan RKPD.		Rp 367.409.500	Rp 583.797.900	Rp 505.000.000	Rp 515.000.000	Rp 515.000.000	Rp 2.486.207.400		
			4.03.01.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Rakor PKH Antar Instansi Vertikal Tingkat Kab. Barito Kuala (Laporan)	1	1	1	0	0	0	1	Subbid. Sosial dan Pemerintahan	Kab. Batola
						Rp 152.678.000	Rp 63.439.000	Rp 89.239.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 152.678.000		
			4.03.01.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (bidang sosial budaya)	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Laporan)	4	4	4	4	4	4	4	Subbid Pengendalian Sosial Budaya	Kab. Batola
						Rp 494.211.000	Rp 86.055.500	Rp 108.155.500	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 494.211.000		
			4.03.01.23.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan	Rakor pembagunan bidang pendidikan (Laporan)	1	1	1	0	0	0	1	Subbid. Sumber Daya Manusia dan Budaya	Kab. Batola
						Rp 114.168.400	Rp 43.234.000	Rp 70.934.400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 114.168.400		
			4.03.01.23.06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan	Rakor bidang kesehatan (Laporan)	1	1	1	0	0	0	1	Subbid. Sumber Daya Manusia dan Budaya	Kab. Batola
						Rp 134.035.000	Rp 55.036.000	Rp 78.999.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 134.035.000		
			4.03.01.	Penyusunan Analisis Pembangunan Manusia	Penyusunan Buku IPM (Judul)	1	1	1	0	0	0	1	Subbid. Sumber Daya Manusia dan Budaya	Kab. Batola
						Rp 120.088.000	Rp 52.621.500	Rp 67.466.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 120.088.000		

			4.03.01.23.10	Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia	Dokumen Renstra dan Renja urusan sub bidang Sosial Budaya yang selaras dengan RPJMD/ Renstra SKPD (dokumen)	1	0	0	1	1	1	3	Subbid. Sumber Daya Manusia dan Budaya	Kab. Batola
						Rp 595.000.000	Rp -	Rp -	Rp 195.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 595.000.000		
			4.03.01.23.11	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Dokumen Renstra dan Renja urusan sub bidang Sosial Budaya yang selaras dengan RPJMD/ Renstra SKPD (dokumen)	1	0	0	26	26	26	78	Subbid. Sosial dan Pemerintahan	Kab. Batola
						Rp 400.000.000	Rp -	Rp -	Rp 130.000.000	Rp 135.000.000	Rp 135.000.000	Rp 400.000.000		
			4.03.01.	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Laporan)	1	1	1	0	0	0	1	Subbid. Sosial dan Pemerintahan	Kab. Batola
						Rp 139.147.000	Rp 67.023.500	Rp 72.123.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 139.147.000		
			4.03.01.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pamsimas	SKPD yang dikoordinasikan (Laporan)	5	5	5	5	5	5	5	Subbid.Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp 336.880.000	Rp -	Rp 96.880.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 336.880.000		
			4.03.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah RENSTRA SKPD Urusan Bidang Ekononi Fisik Prasaranayang Selaras Dengan RKPD.	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	Bidang Ekonomi Fisik Prasarana	Kab. Batola
					Jumlah RENJA SKPD Urusan Bidang Ekonomi Fisik Prasarana Yang Selaras Dengan RKPD.		Rp 551.921.500	Rp 619.387.000	Rp 455.000.000	Rp 455.000.000	Rp 455.000.000	Rp 2.536.308.500		
			4.03.01.22.02	Penyusunan indikator ekonomi daerah.	Penyusunan analisis proyeksi indikator ekonomi kabupaten barito kuala (Laporan)	1	1	0	0	0	0	1	Subbid. Ekonomi	Kab. Batola
						Rp 59.462.500	Rp 59.462.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 59.462.500		
			4.03.01.22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Bidang Ekonomi (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	Subbid. Ekonomi	Kab. Batola
						Rp 841.778.500	Rp 199.644.000	Rp 177.134.500	Rp 155.000.000	Rp 155.000.000	Rp 155.000.000	Rp 841.778.500		
			'4.03.01.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data Spasial Untuk Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	Subbid Pengendalian Ekonomi Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp 408.042.500	Rp 44.040.000	Rp 214.002.500	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 408.042.500		

			4.03.01.22.10	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (IPDMIP)	Dokumen profil sosial ekonomi teknis kelembagaan kab. batola dan laporan kegiatan IPDMIP (Laporan)	2	2	2	2	2	2	2	Subbid. Ekonomi	Kab. Batola
						Rp 1.227.025.000	Rp 248.775.000	Rp 228.250.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 1.227.025.000		
			4.03.01.29	Program Perencanaan Fisik Prasarana	Menjamin perencanaan pembangunan yang berkualitas	6 SKPD		6 SKPD	6 SKPD	6 SKPD	6 SKPD	6 SKPD	Bidang Ekonomi Fisik Prasarana	Kab. Batola
							Rp -	Rp 960.995.800	Rp 736.337.000	Rp 660.988.000	Rp 680.988.000	Rp 3.039.308.800		
			4.03.01.29.01	Perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana.	Keselarasan perencanaan pembangunan sub bidang fisik prasarana, renja dan renstra dengan RKPD dan RPJMD (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	Subbid.Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp 1.807.782.500	Rp -	Rp 152.433.500	Rp 595.349.000	Rp 520.000.000	Rp 540.000.000	Rp 1.807.782.500		
			4.03.01.29.02	Revisi rencana tata ruang	Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Barito Kuala (Dokumen)	6		2	4			6	Subbid.Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp 697.811.500	Rp -	Rp 697.811.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 697.811.500		
			4.03.01.29.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data spasial untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	Subbid Pengendalian Ekonomi Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp 533.714.800	Rp -	Rp 110.750.800	Rp 140.988.000	Rp 140.988.000	Rp 140.988.000	Rp 533.714.800		
			4.03.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Koodinasi pelaksanaan Pamsimas	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	Bidang Ekonomi Fisik Prasarana	Kab. Batola
							Rp 82.917.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 82.917.000		
			4.03.01.30.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pamsimas)	SKPD yang dikoordinasikan (Laporan)	5	5	5	5	5	5	5	Subbid. Sumber Daya Manusia dan Budaya	Kab. Batola
						Rp 82.917.000	Rp 82.917.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 82.917.000		
			4.03.01.27	Program Kajian dan Penelitian	Jumlah Rekomendasi Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan.	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kab. Batola
							Rp 410.715.000	Rp 274.444.000	Rp 274.444.000	Rp 274.444.000	Rp 274.444.000	Rp 1.508.491.000		
			4.03.01.27.01	Identifikasi Permasalahan Pembangunan	Dokumen identifikasi permasalahan pembangunan (Judul)	2	2	2	2	2	2	10	Subbid Pengkajian & Analisis Permasalahan Pembangunan	Kab. Batola
						Rp 1.454.701.000	Rp 356.925.000	Rp 274.444.000	Rp 274.444.000	Rp 274.444.000	Rp 274.444.000	Rp 1.454.701.000		

			4.03.01.27.03	Inventarisasi Potensi Daerah	Dokumen inventarisasi potensi daerah (Judul)	2	2	0	0	0	0	2	Subbid Pengkajian & Analisis Permasalahan Pembangunan	Kab. Batola
						Rp 53.790.000	Rp 53.790.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 53.790.000		
			4.03.01.28	Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Rekomendasi Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan.	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kab. Batola
							Rp 145.920.500	Rp 115.939.000	Rp 151.855.000	Rp 151.855.000	Rp 151.855.000	Rp 717.424.500		
			4.03.01.28.01	Pengembangan dan Diseminasi Bidang Ekonomi Fisik Prasaraa dan Sosial Budaya	Diseminasi penelitian bidang ekonomi fisik prasarana dan Sosal Budaya (Judul)	2	2	2	2	2	2	10	Subbid Disemiinasi Penelitian & Pengembangan	Kab. Batola
						Rp 350.217.000	Rp 42.797.000	Rp 76.855.000	Rp 76.855.000	Rp 76.855.000	Rp 76.855.000	Rp 350.217.000		
			4.03.01.28.02	Pengembangan dan Diseminasi Bidang Sosial Budaya	Diseminasi penelitian bidang sosial budaya	2	2	0	0	0	0	2	Subbid Disemiinasi Penelitian & Pengembangan	Kab. Batola
						Rp 29.682.000	Rp 29.682.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 29.682.000		
			4.03.01.28.03	Koordinasi Kerjasama Litbang Daerah	Koordinasi kerjasama litbang (Laporan)	1	1	1	1	1	1	5	Subbid Disemiinasi Penelitian & Pengembangan	Kab. Batola
						Rp 337.525.500	Rp 73.441.500	Rp 39.084.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 337.525.500		
		Persentase Kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan RTRW.				100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	Kepala	Kab. Batola
							Rp 962.035.000	Rp 697.811.500	Rp1.075.349.000	Rp -	Rp -	Rp 2.735.195.500		
			4.03.01.35	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan RTRW.	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD (100 %)	Bidang Ekonomi Fisik Prasarana	Kab. Batola
							Rp 917.995.000	Rp 697.811.500	Rp1.075.349.000	Rp -	Rp -	Rp 2.691.155.500		
			4.03.01.35.10	Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang	Informasi Tata Ruang Kabupaten, Provinsi maupun Nasional (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	Subbid.Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp 224.258.000	Rp 224.258.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 224.258.000		
			4.03.01.35.11	Revisi rencana tata ruang	Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Barito Kuala (Dokumen)	1	1	2	4			7	Subbid.Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp 2.297.909.500	Rp 524.749.000	Rp 697.811.500	Rp1.075.349.000	Rp -	Rp -	Rp 2.297.909.500		

			4.03.01.35.13	Surve pemetaan	Data spasial untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah (Laporan)	1	1					1	Subbid Pengendalian Ekonomi Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp 168.988.000	Rp 168.988.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 168.988.000		
			4.03.01.29	Program Perencanaan Fisik Prasarana	Menjamin perencanaan pembangunan yang berkualitas	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	Bidang Ekonomi Fisik Prasarana	Kab. Batola
							Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
			4.03.01.29.01	Perencanaan pembanguan bidang fisik prasarana	Keselarasan perencanaan pembangunan sub bidang fisik prasarana, renja dan renstra dengan RKPD dan RPJMD (dokumen)	1	0	0	12	12	12	36	Subbid.Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
			4.03.01.37	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan RTRW (Laporan)	1	1					1	Bidang Ekonomi Fisik Prasarana	Kab. Batola
							Rp 44.040.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.040.000		
			4.03.01.37.05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang (Laporan)	1	1					1	Subbid.Fisik Prasarana	Kab. Batola
						Rp 44.040.000	Rp 44.040.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.040.000		
JUMLAH PAGU PROGRAM / KEGIATAN (RENSTRA 2017-2022)							Rp3.384.248.800	Rp4.056.602.400	Rp3.577.985.000	Rp2.437.287.000	Rp3.107.287.000	Rp 16.563.410.200		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Menginga teratnya kaitan antara Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Bappelitbang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi keempat dengan target untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada tiga misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Bappelitbang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Bappelitbang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Awal)

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2017)	TARGET CAPAIAN Setiap Tahun					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	
1.	Persentase Perencanaan Pembangunan yang Direalisasikan.	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Diseminasi Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Perencanaan.	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (Reviu Kedua)

No	Sasaran Strategis		Indikator Indikator	
	Lama	**Setelah direviu**	**Lama**	**Setelah direviu**
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan Kinerja	Persentase Perencanaan Pembangunan yang Direalisasikan.	1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.
			Persentase Diseminasi Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan.	
			Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW.	2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.

Tabel 7.3.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (Reviu Kedua)

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
						2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan Kinerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.	*Σ Jumlah Keseluruhan TPK semua SKPD.* ----------*x100%* *Jumlah SKPD*	22,50	23,30	23,50	23,75	24,00
				2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.	*Jumlah Rekomendasi yang sesuai dengan RTRW* ----------*x100%* *Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang*	100	100	100	100	100

Tabel 7.4.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (Reviu ketiga)

No	Sasaran Strategis		Indikator Indikator	
	Lama	**Setelah direviu**	**Lama**	**Setelah direviu**
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan Kinerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daru Unsur Perencanaan Kinerja

Tabel 7.5.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (Reviu Ketiga)

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tebuka dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan	*Nilai SAKIP Kabupaten x 30%*	20,77 dari nilai 69,23	22,07 dari nilai 73,55	22,96 dari nilai 76,55	23,12 dari nilai 77,05	23,48 dari nilai 78,28

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilakukan reviu secara periodik/pada kondisi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappelitbang. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/reviu muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Tujuan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 yaitu *Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*.

Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappelitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pelaksanaan Renstra Bappelitbang tahun 2017-2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Bappelitbang yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) setiap periode, dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.